



RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN PANGKALBALAM

KOTA PANGKALPINANG

Tahun 2025





PEMERINTA KOTA PANGKALPINANG
KECAMATAN PANGKALBALAM

Jalan Yos Sudarso Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang
No Tlp. 421040 Email : P4ngkalbalam@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 033 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PANGKALBALAM
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025

CAMAT PANGKALBALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja (RENJA);
- b. bahwa RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023).
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan persiapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
2. melaksanakan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
3. melaksanakan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

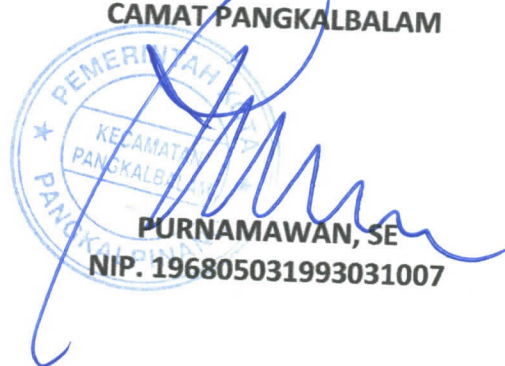
KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Juli 2024

CAMAT PANGKALBALAM

PURNAMAWAN, SE
NIP. 196805031993031007

Lampiran : Keputusan Camat Pangkalbalam
Kota Pangkalpinang
Nomor : 033 TAHUN 2024
Tanggal : Juli 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
KECAMATAN PANGKALBALAM
KOTA PANGKALPINANG

1. Penanggungjawab : Camat
2. Ketua : Sekretaris Camat
3. Sekretaris : Kasubbag PEP dan Keuangan
4. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 3. Kepala Seksi Pembangunan
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

CAMAT PANGKALBALAM



PURNAMAWAN, SE
NIP. 196805031993031007

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 merupakan rangkaian pelaksanaan Renstra tahun pertama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk periode Tahun 2024-2026. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah tidak berlaku lagi. Sebagai perangkat daerah yang taat azas perencanaan pembangunan, keberadaan Dokumen Renja merupakan perpanjangan implementasi dari Dokumen Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan aspek strategis seperti program prioritas Kepala Daerah, maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan Kecamatan yang sesuai dengan peraturan terkait. Seluruh program dan kegiatan yang tercantum di dalam Dokumen Renja Tahun 2024 sudah menterjemahkan program prioritas Kecamatan Pangkalbalam yang telah tersusun di dalam Renstra, khusus untuk tahun 2024.

Dokumen Renja ini memuat beberapa hal penting terkait program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Dokumen ini merupakan langkah awal yang nantinya menjadi dasar penentuan pengukuran kinerja Kecamatan Pangkalbalam kota

pangkalpinang, dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sebagai program dan kegiatan unggulan dalam pelayanan masyarakat di Kota Pangkalpinang umumnya dan masyarakat Pangkalbalam khususnya. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini juga menjadi cerminan atas pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama masa transisi kepemimpinan Kota Pangkalpinang.

Diakhir penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025 ini, kami mengucapkan Alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami selama penyusunan Renja ini. Tak lupa juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Renja ini dapat direalisasikan dengan baik, benar, penuh tanggungjawab dan menjadi alat penunjuk arah yang tepat bagi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dalam mengemban tugas memajukan di Kota Pangkalpinang tercinta ini.

Pangkalpinang, Juli 2024


**CAMAT PANGKALBALAM
KOTA PANGKALPINANG,**
PURNAMAWAN. SE
PEMBINA Tk.I
NIP. 196905031993031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	7
1.4.Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA	
PANGKALPINANG TAHUN 2022	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam	
Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalbalam	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan	
Pangkalbalam Kota Pangkalpinang	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangkalbalam	43
3.3. Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52

BAB V	PENUTUP	69
5.1.	Catatan-catatan Penting	69
5.2.	Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	70
5.3.	Rencana Tindak Lanjut	71

DAFTAR TABEL

Tabel T.C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan	
Pangkalbalam dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
2022 kota Pangkalpinang.....	11
Tabel T.C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam	21
Tabel 2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap	
Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah	25
Tabel TC 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan	
Pangkalbalam Kota Pangkalpinang	28
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan.....	44
Tabel 3.2 Keselarasan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran	
Pembangunan Kecamatan Pangkalbalam	45
Tabel 3.3 Target Indikator Tujuan dan Sasaran.....	46
Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalbalam	
Kota Pangkalpinang Tahun 2023	53
Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalbalam Kota	
Pangkalpinang	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penjabaran Renstra Kecamatan Pangkalbalam Periode 2024-2026. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalbalam untuk tahun anggaran 2025. Renja merupakan penterjemahan dari program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024-2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan secara otomatis menyesuaikan dengan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Renja dimaksud, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkalpinang dan juga dengan para pemangku kepentingan.

Merujuk pada pasal 16 (enam belas) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Pangkalbalam 2024-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2025 yang serta mendasarkan pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Pangkalbalam berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalbalam tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Pangkalbalam mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023).
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224).

13. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Pangkalbalam. Dengan adanya dokumen Renja, pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga pencapaian Rencana Pembangunan Daerah di bidang pelayanan masyarakat dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu, penyusunan Renja Tahun 2025 juga bertujuan untuk melengkapi rangkaian penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, dimana Renja organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya. Renja Tahun 2025 memuat uraian detail program – program dan kegiatan yang direncanakan akan direalisasikan di tahun 2025 sesuai dengan proyeksi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, sebagai upaya mendukung pelaksanaan program-program prioritas Rencana Pembangunan Daerah di Tahun 2025.

14. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024 meliputi bagian – bagian sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
1.1	latar belakang
1.2	landasan hukum
1.3	maksud dan tujuan, dan
1.4	sistematika penulisan
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2022
1.1	Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalbalam.
1.2	Analisis kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam
1.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalbalam
1.4	Review Terhadap Rancangan Awal OPD
1.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangkalbalam
1.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
1.2	Tujuan dan sasaran Renja
1.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN PANGKALBALAM
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2023
dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalbalam**

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencantumkan pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalbalam hingga tahun 2023. Untuk itu pada bagian ini dijabarkan hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pangkalbalam berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam renja tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2023 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pangkalbalam atau realisasi APBD untuk Kecamatan Pangkalbalam. Adapun pokok-pokok materi yang akan dirangkum dalam tabel yang akan dijabarkan setelah ini memuat poin – poin diantaranya :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pangkalbalam ;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Keenam uraian di atas dijabarkan dalam tabel T.C 29 berikut ini :

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	5.903.459.742	80	5.547.709.413	80	93,974	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	Kecamatan
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	Kecamatan
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	Kecamatan
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		93,180		93,180		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	Kecamatan
2		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	7	700.000	7	700.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
3		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	100.000	1	100.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
4		070101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	100.000	1	100.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
5		070101201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	100.000	1	100.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
6		070101201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	100.000	1	100.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
7		070101201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	100.000	1	100.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
8		070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	100.000	1	100.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	100.000	3	100.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
10		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	4.786.496.334	3	4.471.552.169	100	93,420	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan Umum
11		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	73	4.786.296.334	40	4.471.352.169	54,795	93,420	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
12		070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	100.000	1	100.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
13		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	100.000	2	100.000	100	100	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
14		070101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22.169.000		22.049.000		99,459	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan Umum
15		070101205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	22.169.000	2	22.049.000	100	99,459	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	280.639.640	5	259.778.600	100	92,567	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	17.000.000	1	16.995.000	100	99,971	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18		070101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	82.500.000	3	63.550.000	100	77,030	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
19		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	72.039.640	3	71.227.325	100	98,872	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20		070101206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	34.100.000	1	33.900.000	100	99,413	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
21		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5	75.000.000	19	74.106.275	100	98,808	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22		070101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	151.726.000	3	149.901.000	100	98,797	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23		070101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	103.375.000	6	101.870.000	100	98,544	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
24		070101207011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	48.351.000	1	48.031.000	100	99,338	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
25		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	573.548.768	4	559.428.144	100	97,538	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26		070101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	2	79.315.088	2	79.315.088	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
27		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	46.500.000	1	44.086.300	100	94,809	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
28		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	46.979.000	1	46.840.000	100	99,704	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
29		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	400.754.680	4	389.186.756	100	97,113	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
30		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	88.180.000	3	84.300.500	100	95,600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
31		070101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	3.850.000	1	3.237.500	100	84,091	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
32		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	64.330.000	2	61.163.000	100	95,077	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
33		070101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	20.000.000	1	19.900.000	100	99,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									93,295	93,974	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
34	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	90	836.788.126	99,900	806.062.040	100	96,328	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
35		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	37.100.000	3	33.005.000	100	88,962	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
36		070102201001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	1	32.100.000	1	28.150.000	100	87,695	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
37		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000	1	4.855.000	100	97,100	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
38		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	772.188.126	1	748.657.040	100	96,953	Seksi Pelayanan Umum
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Ampui (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		Lurah Ampui
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:Laporan)	2		1		50		Lurah Pasir Garam
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Rejosari (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		Lurah Rejosari
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		Lurah Ketapang
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		Lurah Lontong Pancur
39		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	12.000.001	1	10.030.000	100	83,583	Seksi Pelayanan Umum
40		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	760.188.125	1	738.627.040	100	97,164	Lurah Pasir Garam
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		Lurah Lontong Pancur

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1		100		Lurah Ketapang
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1		100		Lurah Ampui
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan: Laporan)	1		1		100		Lurah Rejosari
41		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Laporan)	1	27.500.000	1	24.400.000	100	88,727	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keteriban Umum
42		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	27.500.000	1	24.400.000	100	88,727	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keteriban Umum
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	96,328	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
43	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, (Dengan Satuan:%)	100	2.824.042.402	100	2.779.629.699	100	98,427	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
				Persentase sarpras publik yang terbangun (Dengan Satuan:%)	100		93,180		93,180		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
				Persentase lembaga kemasyaratan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
44		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JUmlah Laporan Kegiatan pemberdayaan kelurahan Ampui (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.738.827.402	1	2.702.410.058	100	98,670	Lurah Ampui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, (Dengan Satuan:Laporan)	7		7		100		Seksi Pemberdayaan masyarakat
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan rejosari (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		Lurah Rejosari
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:laporan)	3		1		33,333		Lurah Pasir Garam

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		Lurah Lontong Pancur
				Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		Lurah Ketapang
45		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	5	15.000.000	5	15.000.000	100	100	Seksi Pembangunan
46		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	5	2.718.827.402	5	2.683.410.058	100	98,697	Lurah Pasir Garam
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		Lurah Lontong Pancur
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	5		5		100		Lurah Ketapang
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	4		4		100		Lurah Ampui
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		Lurah Rejosari
47		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5.000.000	5	4.000.000	100	80	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
48		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	5	85.215.000	5	77.219.641	100	90,617	Seksi Pemberdayaan masyarakat
49		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	85.215.000	2	77.219.641	33,333	90,617	Seksi Pemberdayaan masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									98,295	98,427	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
50	-	070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	20.860.000	100	19.110.000	100	91,611	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
51		070104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	20.860.000	1	19.110.000	100	91,611	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
52		070104201001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	20.860.000	1	19.110.000	100	91,611	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	91,611	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
53	-	070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan, (Dengan Satuan:persen)	100	150.000.000	100	119.325.000	100	79,550	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
54		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000	1	119.325.000	100	79,550	Seksi Pemberdayaan masyarakat
55		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	150.000.000	1	119.325.000	100	79,550	Seksi Pemberdayaan masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	79,550	
PREDIKAT KINERJA									ST	T	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)									96,942	91,978	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Kegiatan Berjalan sesuai dengan rencana aksi/jadwal							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Realisasi keg penyediaan gaji ASN tidak mencapai target karena target awal yang ditetapkan sudah termasuk PHL - Jumlah realisasi anggaran keg. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal kecil karena tidak adanya peserta untuk beberapa cabang lomba MTQ sehingga hadiah lomba banyak yang tidak terrealisasi.							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:											

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 02-02-2024

CAMAT PANGKALBALAM
KOTA PANGKALPINANG



Purnamawan, SE
NIP. 196905031993031007

Berdasarkan evaluasi atas Tabel T.C 29, serapan anggaran Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sebesar 91,97 Persen. Masih belum maksimalnya serapan anggaran tersebut dilatar belakangi teknis pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan. Sub kegiatan yang serapan anggarannya nya masih dibawah 80% yaitu **penyediaan peralatan rumah tangga** dimana penawaran harga beli lebih rendah dari pagu dana yang tersedia sehingga serapan dana hanya mencapai 77%. Selain sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, ada juga sub kegiatan **pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal** yang hanya terealisasi sebesar 79,55 persen, ini disebabkan karena tidak semua cabang lomba MTQ memiliki peserta sehingga dana yang disiapkan untuk semua cabang tidak bisa terealisasi dengan maksimal.

Adapun untuk kinerja, capaian kinerja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebesar 96,94 persen. Untuk capaian kinerja ini, pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN masih dibawah 70% yaitu hanya sebesar 54,96 persen, ini disebabkan karena target yang ditetapkan pada renstra/renja sebesar 73 orang hanya terealisasi sebanyak 40 orang, ini sebabkan salah penentuan jumlah orang penerima gaji ASN yang dimana penentuan target tersebut juga termasuk pegawai tidak tetap. Sub kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan juga masih rendah untuk capaian kinerjanya yaitu hanya sebesar 33,33 persen. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan target pembangunan yang ditetapkan tidak mencapai target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. seiring dengan tujuan yang dimiliki oleh Kecamatan Pangkalbalam terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Persentase penyelenggaraan pemeritahan kecamatan Pangkalbalam.
2. Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani

Pengukuran atas kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalbalam dilakukan melalui analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam. Pengukuran dilakukan atas ketercapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Renstra, untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pada akhirnya, akan diperoleh rasio capaian indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator dimaksud. Berikut dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang tergambar melalui tabel TC.30 berikut ini:

Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam
Kota Pangkalpinang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Catatan Penting
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	
1.	Persentase penyelenggaraan pemeritahan kecamatan Pangkalbalam	-	-	100%	100%	100%	100%	-
2.	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	-

Hingga akhir tahun 2023, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang telah melaksanakan seluruh program yang telah menjadi tanggungjawab. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran. Capaian Kinerja Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu “**Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam**” dengan indikator Persentase penyelenggaraan pemeritahan kecamatan Pangkalbalam dan “**Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam**” dengan indikator target yaitu Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Pangkal Balam.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Kinerja OPD Kecamatan Pangkalbalam apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra sudah cukup baik dilihat dari persentase capaian kegiatan karena sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik. Pada Penyusunan Renja OPD kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 ini telah mensinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta Renstra Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024-2026. Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD penyebabnya terdiri dari banyak faktor baik berupa hal-hal yang bersifat internal dari OPD kecamatan itu sendiri maupun hal-hal lain yang tidak dapat dikontrol sebagai faktor eksternal.

Permasalahan yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi Pelayanan pada Kecamatan Pangkalbalam dapat diuraikan sebagai berikut :

Permasalahan Umum

- 1) Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 4) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- 5) Tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan Remaja;

1. Kekuatan

- Etos kerja yang tinggi dari SDM yang ada;
- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas;
- Komitmen dan kebijakan Pemerintah Kota dalam Pelayanan kepada Masyarakat;
- Komitmen dan kebijakan Pemerintah Kota dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- Kerjasama yang baik antara masyarakat dan stakeholder yang terkait.

2. Kelemahan

- Keterbatasan SDM yang tersedia dan kesempatan dalam peningkatan kompetensi;
- Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan di kecamatan;
- Keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

Kelemahan yang dianalisis di atas diolah sedemikian rupa untuk mendorong keberhasilan pencapaian sasaran Kecamatan Pangkalbalam. Dengan mengenali kelemahan aspek tersebut, akan lebih mudah bagi perangkat daerah khususnya Kecamatan Pangkalbalam untuk memilah dan memilih sisi mana yang hendak dijadikan prioritas ke depan.

Adapun identifikasi atas faktor penghambat dan pendorong dimaksud dijabarkan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. 2.	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT.	1. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan;	1. Keterbatasan SDM yang tersedia dan kesempatan dalam peningkatan kompetensi	1. Etos kerja yang tinggi dari SDM yang ada
		2. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;	2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) masing- masing kegiatan di kecamatan	2. Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas
		3. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);	3. Keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan	3. Komitmen dan kebijakan Pemerintaha Kota dalam Pelayanan kepada masyarakat
		4. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;	4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	4. Komitmen dan kebijakan Pemerintah Kota dalam pembangunan dan kemasyarakatan

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan Remaja	5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum	5. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan stakeholder yang terkait.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 juga memperhatikan kesesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025. Hal ini dikarenakan Renja perangkat daerah merupakan penterjemahan pelaksanaan visi misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKPD sehingga harus terjalin kesesuaian/ kesinkronan satu sama lain. Berikut dijabarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024 yang ditampilkan pada tabel T.C 31 berikut ini :

Tabel TC 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pangkalpinang

Perangkat Daerah : Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN				10.138.859.281	KECAMATAN				10.138.859.281	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.250.110.223	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.250.110.223	
			1. Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam	70				1. Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam	70		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	1.050.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	1.050.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	150.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	150.000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150.000	
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	450.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pangkalbalam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	450.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	5.560.925.723	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	5.560.925.723	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	5.560.625.723	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	5.560.625.723	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150.000	
			2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam	3,70				2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam	3,70		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0%	32.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0%	32.000.000	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah	100%	190.064.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah	100%	190.064.500	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	8.425.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	8.425.000	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.839.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.839.500	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	
4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.347.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.347.300.000	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	53.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	53.600.000	
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.700.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.260.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.260.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	118.770.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	118.770.000	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	78.770.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	78.770.000	
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam	100 %	350.817.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam	100 %	350.817.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkal Balam yang dilaksanakan	100%	7.950.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkal Balam yang dilaksanakan	100%	7.950.000	
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkalbalam	1 Dokumen	7.950.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkalbalam	1 Dokumen	7.950.000	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Pangkal Balam	100%	4.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Pangkal Balam	100%	4.000.000	
2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	1 Laporan	4.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	1 Laporan	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Pasir Garam	100%	52.100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Pasir Garam	100%	52.100.000	
3.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir Garam		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Pasir garam	1 Laporan	52.100.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir Garam		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Pasir garam	1 Laporan	52.100.000	
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ketapang	100%	66.422.900	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ketapang	100%	66.422.900	
4.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ketapang		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ketapang	1 Laporan	66.422.900	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ketapang		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ketapang	1 Laporan	66.422.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ampui	100%	60.705.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ampui	100%	60.705.000	
5.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ampui		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ampui	1 Laporan	60.705.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ampui		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ampui	1 Laporan	60.705.000	
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Rejosari	100%	52.100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Rejosari	100%	52.100.000	
6.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Rejosari		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Rejosari	1 Laporan	52.100.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Rejosari		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Rejosari	1 Laporan	52.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Lontong Pancur yang dilaksanakan	100%	65.077.100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Lontong Pancur yang dilaksanakan	100%	65.077.100	
7.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Lontong Pancur	1 Laporan	65.077.100	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Lontong Pancur	1 Laporan	65.077.100	
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pangkal Balam yang dilaksanakan	100	42.462.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pangkal Balam yang dilaksanakan	100	42.462.000	
8.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	42.462.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	42.462.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.296.862.058	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.296.862.058	
			Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam	80%				Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam	80%		
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan Pangkal Balam	100%	27.975.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan Pangkal Balam	100%	27.975.000	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	17.900.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	17.900.000	
1.2	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	10.075.000	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	10.075.000	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam	100%				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkal Balam	100%	98.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkal Balam	100%	98.000.000	
2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	2 Lembaga Kemasyara katan	98.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	2 Lembaga Kemasyarak atan	98.000.000	
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Garam	100%	397.856.922	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Garam	100%	397.856.922	
3.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pasir Garam	6 Lembaga Kemasyara katan	397.856.922	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pasir Garam	6 Lembaga Kemasyarak atan	397.856.922	
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Ketapang	100%	466.558.488	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Ketapang	100%	466.558.488	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
4.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ketapang	6 Lembaga Kemasyarakatan	466.558.488	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ketapang	6 Lembaga Kemasyarakatan	466.558.488	
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Ampui	100%	363.621.264	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Ampui	100%	363.621.264	
5.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ampui	6 Lembaga Kemasyarakatan	363.621.264	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ampui	6 Lembaga Kemasyarakatan	363.621.264	
6	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Rejosari	100%	517.293.804	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Rejosari	100%	517.293.804	
6.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Rejosari	6 Lembaga Kemasyarakatan	517.293.804	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Rejosari	6 Lembaga Kemasyarakatan	517.293.804	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Lontong Pancur	100%	425.556.580	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Lontong Pancur	100%	425.556.580	
7.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lontong Pancur	6 Lembaga Kemasyara katan	425.556.580	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lontong Pancur	6 Lembaga Kemasyarak atan	425.556.580	
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam	100%	201.170.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam	100%	201.170.000	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat	100%	201.170.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat	100%	201.170.000	
1.1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	201.170.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	201.170.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
E	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Pangkal Balam	100%	39.900.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Pangkal Balam	100%	39.900.000	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	39.900.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	39.900.000	
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	1 Lapiroan	39.900.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam	1 Lapiroan	39.900.000	

Hasil review menunjukkan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD telah mengakomodir Renja Kecamatan Pangkalbalam. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunannya, Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025 telah berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Banyaknya fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan di masyarakat kadang sering berbenturan dengan tugas dan fungsi dinas atau badan bahkan instansi di tingkat provinsi atau pusat. Hal inilah yang harus diperjelas tentang tugas dan fungsinya. Kecamatan hanya mempunyai fungsi fasilitasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi di tingkat kabupaten, provinsi atau bahkan Kementerian

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangkalbalam

Adapun Tujuan dari Rencana Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan

No	Isu Strategis	Rumusan Tujuan
1	2	3
1.	Belum optimalnya pelayanan publik.	Meningkatkan Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam.
2.	Belum optimalnya Pengelolaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
3.	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi	
4.	penyelenggaraan pembangunan wilayah Masih Tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT)	

Tujuan kecamatan Pangkalbalam yaitu **“Meningkatkan Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam”** memiliki 2 sasaran yaitu **1. “Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam”**, dengan indikator **Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan PangkalBalam** dan **2. “Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam”** dengan indikator **Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Pangkal Balam**. Keselarasan tujuan dan sasaran Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tersebut digambarkan pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Keselarasan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran
Pembangunan
Kecamatan Pangkalbalam

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	
1	2	3		4	5	
1.	Meningkatkan Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Pangkalbalam	1. Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam	1.1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan PangkalBalam
				2. terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam	2.1	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Pangkal Balam

Target indikator tujuan dan Sasaran di atas telah ditentukan di dalam dokumen Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Angka target menjadi pemacu kinerja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang selama 3 tahun ke depan. Secara lengkap, target Kinerja tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi kinerja awal RPD	TARGET KINERJA SASARAN		
						Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2		4		5		7	8	9
1.	Meningkatkan Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam		1.1	Indek Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Pangkalbalam	Angka	0	88,30	88,50	89,00
		1. Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam	1.1	Persentase penyelenggara an pemerintahan kecamatan PangkalBalam	Persen	100	100	100	100
		2. terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam	2.1	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Pangkal Balam	Persen	100	100	100	100

Target indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 88,50 dengan target indikator sasaran sebesar 100%. Untuk dua indikator sasaran yang ditentukan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan

salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, hingga sub kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2024 mengacu pada peraturan berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya keputusan menteri ini, praktis seluruh nomenklatur program maupun kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen RPJMD) mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk reklasifikasi dan rekodefikasi;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
4. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).
5. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224).

a. Dasar pertimbangan penentuan program dan kegiatan

Dalam Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025, penentuan program dan kegiatan yang prioritas maupun non prioritas didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Pangkalbalam. Program dan kegiatan yang dipilih dianggap dapat mengakomodir dan menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Pangkalbalam, terutama yang berkaitan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi unsur kewilayahan Tahun 2025 dijabarkan dalam program dan kegiatan berikut ini :

UNSUR KEWILAYAHAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA
	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Pasir Garam
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Ketapang
4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Ampui
5. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Rejosari
6. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Lontong Pancur

2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Evaluasi Kelurahan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Pasir Garam
3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Ketapang
4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Ampui
5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Rejosari
6. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Lontong Pancur

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah , dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

5 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

5.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum , dengan sub kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025 diusulkan untuk dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja		
						UNSUR KEWILAYAHAN					
						KECAMATAN				10.138.859.281	
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.250.110.223	
							1. Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalbalam		70		
7	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu		100%	1.050.000	
7	1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pangkalbalam	2 Dokumen	150.000	

KODE					BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pangkalbalam	2 Dokumen	150.000	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Pangkalbalam	2 Dokumen	150.000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pangkalbalam	4 Laporan	150.000	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pangkalbalam	3 Laporan	450.000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3 Laporan	5.560.925.723	

KODE						BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	5.560.625.723		
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		2 Laporan	150.000		
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	150.000		
						2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kecamatan Pangkalbalam		3,70			

KODE						BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	1				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN		0%	32.000.000	
7	1	1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	32.000.000	
7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah		100%	190.064.500	
7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	8.425.000	
7	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	32.800.000	
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	40.839.500	

KODE					BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	25.000.000	
7	1	1			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	3.000.000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	80.000.000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.347.300.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	53.600.000	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	33.700.000	

KODE					BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1.260.000.000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik		100%	118.770.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	78.770.000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	40.000.000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu di Kecamatan Pangkal Balam		100 %	350.817.000	

KODE						BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	2	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkal Balam yang dilaksanakan		100%	7.950.000	
7	1	2	2.01	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pangkalbalam		1 Dokumen	7.950.000	
7	1	2	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Pangkal Balam		100%	4.000.000	
7	1	2	2.02	2		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam		1 Laporan	4.000.000	

KODE						BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Pasir Garam		100%	52.100.000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Pasir garam		1 Laporan	52.100.000		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ketapang		100%	66.422.900		

KODE					BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ketapang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ketapang		1 Laporan	66.422.900	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Ampui		100%	60.705.000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ampui	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Ampui		1 Laporan	60.705.000	

KODE					BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Rejosari		100%	52.100.000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Rejosari		1 Laporan	52.100.000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan Lontong Pancur yang dilaksanakan		100%	65.077.100	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam kelurahan Lontong Pancur		1 Laporan	65.077.100	

KODE						BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Pangkal Balam yang dilaksanakan		100	42.462.000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		2 Laporan	42.462.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.296.862.058		
						Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pangkal Balam		80%			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan Pangkal Balam		100%	27.975.000		

KODE					BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga	17.900.000	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		5 Laporan	10.075.000	
						Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pangkal Balam		100%		
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkal Balam		100%	98.000.000	
7	1	3	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan		2 Lembaga Kemasyarakata n	98.000.000	

KODE						BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	3				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Garam		100%	397.856.922	
7	1	3				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pasir Garam		6 Lembaga Kemasyarakatan	397.856.922	
7	1	3				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Ketapang		100%	466.558.488	
7	1	3				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ketapang		6 Lembaga Kemasyarakatan	466.558.488	

KODE						BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	3				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Ampui		100%	363.621.264	
7	1	3				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Ampui		6 Lembaga Kemasyarakatan	363.621.264	
7	1	3				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Rejosari		100%	517.293.804	
7	1	3				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Rejosari		6 Lembaga Kemasyarakatan	517.293.804	

KODE					BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	3			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Lontong Pancur		100%	425.556.580	
7	1	3			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lontong Pancur		6 Lembaga Kemasyarakata n	425.556.580	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Pangkal Balam		100%	201.170.000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di Kecamatan Pangkal Balam penugasan kepala Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat		100%	201.170.000	

KODE					BIDANG URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
							LOKASI	Target Capaian Kinerja		
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	201.170.000	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Pangkal Balam		100%	39.900.000	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		100%	39.900.000	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam		1 Lapiroan	39.900.000	

5.1 Catatan-catatan Penting

Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan RKPD Kota Pangkalpinang untuk pelayanan terhadap masyarakat sekaligus pencapaian Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan ini diupayakan mengakomodir pencapaian indikator yang menjadi kinerja utama Kecamatan Pangkalbalam. Tidak maksimalnya pencapaian kinerja Kecamatan Pangkalbalam sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalbalam, serta tentunya berpengaruh pula pada kebijakan – kebijakan Pemerintah yang akan diambil di Kota Pangkalpinang. Adapun indikator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dijabarkan melalui tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Tahun 2024
1	2	3		4
1	Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Pangkalbalam	1.1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan PangkalBalam	100
2	Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Pangkalbalam	2.1	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Pangkal Balam	100

52. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan acuan bagi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pelayanan masyarakat. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Pangkalbalam tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Pangkalbalam, guna mendukung tercapainya target pembangunan

- daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Kota Pangkalpinang 2025.
2. Renja Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
 3. Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalbalam mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025, maka Kecamatan Pangkalbalam akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

53. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaras dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Renja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dalam

mensukseskan program – program strategis Rencana Pembangunan Daerah. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025, maka Kecamatan Pangkalbalam akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.